

## **RINGKASAN DAN SUMMARY**

### **ANALISIS ASPEK RASIONAL DALAM PENGANGGARAN PUBLIK TERHADAP EFEKTIVITAS PENGIMPLEMENTASIAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**

**Oleh:**

**Fatchan Achyani, SE, MSi.**

**Bayu Tri Cahya, SE.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aspek rasional yaitu sumber daya, informasi, dan orientasi tujuan terhadap implementasi efektivitas anggaran berbasis kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja dimaksudkan agar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, setiap institusi publik tidak hanya mempertanggungjawabkan input-nya semata tetapi juga harus mempertanggungjawabkan untuk apa dan berapa output dan hasil (outcome) yang diperoleh dari setiap dana yang dibelanjakan.

Pada dasarnya penelitian ini merupakan suatu wacana baru khususnya untuk pemerintah kota Surakarta. Dengan mempertimbangkan kelemahan dan kelebihan anggaran berbasis kinerja serta perkembangan yang masih beragam, maka evaluasi status atas pengimplementasian anggaran berbasis kinerja yang telah dicapai pemerintah saat ini dianggap penting untuk diteleti. Apakah perubahan pendekatan anggaran ini efektif dijalankan atau hanya menjadi aksi simbolis yang terjebak pada formalitas penyusunan anggaran dan hanya berujung pada kegagalan reformasi. Hal ini merupakan suatu upaya yang tepat untuk menjaga pada jalur yang tepat

Dalam penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan metode purposive atau lebih tepatnya dengan judgement sampling untuk memilih anggota sampelnya (responden). Dimana sampelnya adalah para pejabat penggunaan anggaran di satuan kerja perangkat daerah pemerintah kota surakarta. Beberapa kriteria yang melandasi pemilihan responden adalah bahwa responden tersebut terlibat dalam perencanaan penyusunan anggaran, pengukuran kinerja dan dalam pengambilan keputusan anggaran serta yang nantinya mengembalikan kuisioner. Dalam Permendagri 13 tahun 2006 pasal 10 adalah pejabat pengguna anggaran adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang diberikan kewenangan atas penggunaan anggaran. Dimana Sesuai dengan Peraturan daerah no 6 tahun 2008 tentang

organisasi dan tata kerja perangkat daerah kota Surakarta, satuan kerja perangkat daerah berjumlah 84 satuan kerja perangkat daerah sehingga nantinya kuisisioner yang akan disebarakan sebanyak 84 yang ditujukan kepada pejabat pengguna anggaran pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Variabel yang diujikan dalam penelitian ini terdiri efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja dan aspek rasional. Dimana aspek rasional tersebut terdiri dari sumber daya, informasi, dan orientasi tujuan sebagai aspek rasional dan efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja. Dari analisis regresi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel sumber daya dan informasi, terbukti mempengaruhi secara positif efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja pada pemerintah kota Surakarta. Sedangkan untuk variabel orientasi tujuan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja

Berdasarkan dari hasil analisis menunjukkan bahwa dukungan sumber daya dalam setiap regulasi pada organisasi pemerintah pada umumnya merupakan hal yang formal yang harus dilakukan dan upaya tersebut terhadap telah coba dilakukan oleh organisasi pemerintah (satuan kerja perangkat daerah) di Surakarta. Alokasi dana dan penetapan pegawai untuk melaksanakan peraturan baru, serta waktu yang disediakan lebih merupakan hal yang harus dilakukan sebagai bentuk respon birokrasi dan bentuk disiplin untuk menunjukkan bahwa organisasi telah melaksanakan hal yang tepat. Terkait variabel informasi, sebagian besar responden mengindikasikan sudah ada upaya untuk mengikuti pelatihan atau workshop atau seminar tentang anggaran berbasis kinerja khususnya bagi pegawainya.

Sedangkan untuk tidak adanya pengaruh yang signifikan variabel orientasi tujuan terhadap efektivitas implementasi anggaran berbasis kinerja pada pemerintah kota Surakarta menurut peneliti karena para penganggar tidak memiliki orientasi tujuan dan orientasi efisiensi terkait dengan anggaran berbasis kinerja. Orientasi menghabiskan anggaran tanpa memperhatikan kualitas *output* dan tujuan program yang telah disusun dalam perencanaan strategis pelaksanaan anggaran merupakan paradigma anggaran tradisional. Dimana paradigma tersebut bertolak belakang dengan anggaran berbasis kinerja yang memperhatikan keterkaitan dana publik dengan *output* dan tujuan program. Hal-hal ini terjadi karena kompetensi pejabat pengguna anggaran dalam hal pemahaman anggaran berbasis kinerja masih belum optimal.